EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMP

Achmad Dudin

Abstract

In order to improve the quality of education in Indonesia, Government has published Gov. Regulation Number 19 of 2005 on National Standard of Education (SNP). This SNP functioned as the basic for planning, implementing and supervising of education, in order to realize a qualified national education. For having assurance and quality control of education implementation, evaluation is needed to be done—including to Islamic education (PAI).

This research focused on evaluation of Islamic education process in 10 cities in Indonesia. Its result shows that Junior High Schools graduated in 2006/2007 period have reached a good achievement. Their report score was also categorized good, this indicated by a raising score on their odd and even semesters. These all are caused by input and process factors which closed to Standard of National Education.

Keywords: *PAI evaluation, KBK/KTSP and National Standard of Education (SNP).*

Lahir di Brebes, 6 Agustus 1968. Riwayat pendidikan dimulai di SDN Brebes tamat 1981, SMP Brebes 1984, PGAN Pekalongan 1987, Fak. Tarbiyah PAI IAIN Walisongo Semarang 1993 dan Pasca Sarjana UNJ Jakarta (sedang penulisan tesis). Menjadi pegawai/peneliti Balai Litbang Agama Semarang 1994-2000 dan Peneliti Puslitbang Penda dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag 2001 - sekarang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lingkup SNP meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan; dan (h) standar penilaian pendidikan.

SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), sesuai dengan SNP, maka perlu dilakukan evaluasi, yang pada tahap ini dikhususkan pada penyelenggaraan PAI tingkat SMP. Evaluasi ini bersifat sistemik, mencakup: (1) aspek input, meliputi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana; (2) aspek proses, meliputi standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan; dan (3) aspek out-put, meliputi standar kompetensi lulusan, dari segi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

Berdasarkan penelitian terdahulu (2006) tentang evaluasi penyelenggaraan PAI di tingkat SD masih banyak yang belum sesuai dengan standar nasional pendidikan antara lain dari segi input: dalam penyusunan dan pengembangan kerangka dasar kurikulum kurang melibatkan *stake holders* (misalnya komite sekolah) dan kegiatan mandiri yang dibebankan kepada peserta didik jarang dirancang untuk pendalaman materi pembelajaran PAI peserta didik, sebagian GPAI masih berijasahkan SLTA, masih kurangnya pemanfaatan jaringan internet, OHP, komputer, multimedia, laboratorium dan pemanfaatan perpustakaan dalam pembelajaran.

Sedangkan segi proses; dalam perencanaan pembelajaran PAI, GPAI SD masih lemah dalam penyiapan alat bantu pembelajaran secara efektif dan penyiapan alat bantu pembelajaran buatan GPAI; pada aspek pelaksanaan pembelajaran PAI, GPAI kurang melakukan pengembangan ide peserta didik dalam pembelajaran; pada aspek penilaian GPAI SD kurang meman-

faatkan tes menjodohkan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi dua hal yang berhubungan dan kurang menggunakan tes benar salah untuk mengukur pemahaman materi; dan pada aspek pengawasan kegiatan PAI, GPAI kurang melakukan evaluasi melalui praktek langsung kinerja GPAI dalam pembelajaran. Pada standar penilaian PAI, aspek penilaian hasil belajar GPAI kurang memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran; pada aspek penilaian hasil belajar kelompok, GPAI kurang melakukan penugasan dalam membuat kelompok diskusi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam bermusyawarah, namun tampak GPAI tetap melakukan penilaian pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan temuan di atas, maka penyelenggaraan PAI pada tingkat SMP perlu pula dievaluasi, sejauhmana penyelenggaraan PAI di SMP tahun 2007 telah sesuai dengan standar nasional pendidikan, baik segi input, proses maupun output. Dengan penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan bagi pengambil keputusan (*decision makers*) dalam mengembangkan PAI SMP sesuai SNP.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana input penyelenggaraan PAI tingkat SMP?
2. Bagaimana proses penyelenggaraan PAI tingkat SMP?
3. Bagaimana out-put penyelenggaraan PAI tingkat SMP?
4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan PAI tingkat SMP dalam rangka pencapaian SNP?

C. Tujuan dan Kegunaan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Input penyelenggaraan PAI tingkat SMP;
2. Proses penyelenggaraan PAI tingkat SMP;
3. Out-put penyelenggaraan PAI tingkat SMP;
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan PAI tingkat SMP dalam rangka pencapaian SNP.

Studi ini berguna sebagai landasan berpijak dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan pendidikan agama Islam tingkat SMP sesuai Sstandar Nasional Pendidikan di masa mendatang.

D. Kerangka Teori

Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa meyakini

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan.[1] Namsa, mengungkapkan tentang pengertian pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar yang berlangsung dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bimbingan, pengajaran, dan /atau latihan dalam membentuk kepribadian serta menemukan dan mengembangkan fitrah yang dibawa sejak lahir, guna kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.[2] Menurut Yusuf, Pendidikan Agama Islam ialah usaha atau kegiatan untuk membuat anak didik berkepribadian sesuai dengan ajaran Islam, terutama Al Qur'an dan sunnah Rasul, sehingga ajaran itu terwujud pada sikap dan perilakunya demi terjaminnya kesi-nambungan ajaran Islam.[3] Berdasarkan definisi tersebut berarti bahwa Pendidikan Agama Islam harus merupa-kan suatu kegiatan untuk membuat anak didik kreatif dan berkepribadian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga ajaran itu terwujud pada sikap dan perilakunya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional dijelaskan tentang pendidikan Agama di Sekolah Dasar antara lain pada pasal 7 ayat 1 bahwa pendidikan agama pada tingkat sekolah dasar dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan da teknologi, etetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.[4] Selanjutnya pada pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.[5] Lebih lanjut pada pasal 29 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa pendidik pada tingkat SMP harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan Sarjana (S1), memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan, dan memiliki profesi guru untuk SMP.

Penilaian hasil belajar pendidikan agama sesuai dengan ayat 3 pasal 64

---

[1] Departemen Agama. 1999. *Kurikulum Sekolah Menengah "Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam"*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, Departemen Agama, h. 1.

[2] Yunus Namsa. 2000. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 23

[3] Yusuf, dkk. 1990. *Pendidikan Agama Islam, Suatu Analisis Rangsangan Afeksi*, Jakarta: Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum FPIPS-IKIP Jakarta, h. 4.

[4] *Ibid*, h. 10.

yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar kelompok agama dan akhlak mulia dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan tingkah laku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik di samping penilaian yang dilakukan melalui ujian, ulangan, dan penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Berkaitan dengan studi evaluasi, ini yang dimaksud adalah proses pengumpulan data secara ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Langkah-langkah penelitian evaluasi menurut Stufflebeam, adalah; (1) melukiskan atau menggambarkan aktifitas yang dievaluasi, keputusan tentang aktivitas yang akan dijalankan, informasi yang diperlukan untuk melayani keputusan tersebut, dan kebijakan yang akan menentukan perolehan dan penyediaan informasi, (2) memperoleh informasi yang diperlukan, (3) menyampaikan informasi tersebut kepada mereka yang akan membuat keputusan.[6]

Selanjutnya sebagaimana disinggung di muka, studi ini menggunakan pendekatan sistemik. Dengan demikian studi ini menganggap penyelenggaraan pendidikan agama sebagai sebuah sistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah seperangkat unsur atau bagian-bagian yang saling terkait dan satu sama lain saling bergantung serta secara keseluruhan membentuk sebuah totalitas. Sistem juga bisa diartikan sebagai suatu betuk hubungan antara input yang mengalir menuju proses untuk kemudian keluar menjadi output.[7] Karena hubungan antara komponen sistem tersebut terjalin sedemikan rupa, rasanya sulit untuk berbicara secara baik hanya tentang salah satu unsur saja tanpa memperhatikan kaitannya dengan yang lain. Oleh karena itu fokus pembicaraan akan terletak pada keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan agama baik input, proses maupun outputnya.

Dari kacamata sistemik ini, dalam penyelenggaraan pendidikan agama, dapat dipandang sebagai sebuah totalitas yang terdiri atas sedikitnya

---

[6] Daniel, L. Stufflebeam. 1977. *Educational Evaluation Decision Making.* Itasca. Illinois: F.E. Peacock Publisher, Inc, h. 215

[7] Muhaimin AG. 2000. "Program Penyetaraan D-II GPAI SD/MI: Tinjauan sistemik, sebagaimana mengutip pendapat Chadwick, G., *A Systems View Of Paning, Dialog,* No 52 Th XXII, Jakarta, Desember) h. 74.

tiga komponen utama yaitu input (masukan), proses dan output (keluaran).[8] Dengan menggunakan pendekatan sistemik dalam mengevaluasi penyelenggaraaan pendidikan agama tingkat SMP dalam pencapaian standar nasional pendidikan, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama,* Evaluasi Input, bertujuan untuk menyediakan informasi guna menentukan bagaimana menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan program. Komponen input meliputi sarana, prasarana, personil dan biaya serta segala fasilitas yang ada dan dipakai dalam berbagai jenis dan bentuk. Adapun evaluasi input bertujuan menyediakan informasi guna menentukan bagaimana menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan agama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengukur 1) kemampuan yang relevan dari lembaga yang bertanggungjawab, 2) strategi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan agama, 3) disain untuk melaksanakan strategi terpilih.[9] Berkaitan dengan evaluasi input penyelenggaraan pendidikan agama dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), maka indikator yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah sesuai dalam standar isi PAI: (BAB III ttg Standar Isi)/(Permen Diknas No. 22 Tahun 2006) diantaranya meliputi: (1) kerangka dasar kurikulum PAI (Ps 5,6,7,8,9), termasuk beban belajar PAI (Ps 10,11,12,13,14,1516,17), dan kalender pendd. PAI (waktu pembel efektif) (ps18); (2) standar GPAI: (BAB VI Std Pendidik dan Tendik dan kualifikasi akademik (Ps. 28-34), mencakup kualifikasi agen pembel (Paedagogik, profesional, kepribadian & sosial); (3) standar sarana dan prasarana: (BAB VII Std Sarana & Prasarana: Ps 42- 48).

Kedua, Evaluasi proses, diperlukan untuk memberi umpan balik kepada orang yang bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan dan prosedurnya.[10] Evaluasi proses menurut Stufflebeam bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi, dalam proses, kelemahan prosedur disain atau implementasi, memperoleh informasi untuk keputusan pemograman kembali, untuk pencatatan, menilai even-even prosedural dan aktifitas.[10] Sehubungan dengan evaluasi

[8] *Ibid.*

[9] Stuflbebeam. *op. cit,* h. 222.

[10] *Ibid,* h 232.

proses penyelenggaraan pendidikan agama dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), maka indikator yang akan dievaluasi dalam penelitian ini antara lain: (1) standar proses: (BAB IV Std Proses: Ps 19-24) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan kegiatan pendidikan; (2) standar penilaian pendidikan: (BAB X: Ps 63-72) meliputi penilaian hasil belajar, penilaian hasil belajar kelompok, dan aspek penilaian (kognitif, afektif dan psikomotor).

Ketiga, Evaluasi Output (keluaran), dihasilkan oleh sistem pendidikan adalah keseluruhan perolehan baik dalam bentuk produk sempurna (*Finished Product*). Yang dimaksud dengan produk sempurna dari sebuah sistem pendidikan adalah para lulusan. Output yang diharapkan dan setiap sistem pendidikan sudah barang tentu adalah para lulusan dengan kemampuan tertentu baik yang diperoleh secara langsung dan pembelajaran maupun kemampuan sampingan yang secara tidak langsung ia peroleh dari sistem dimana ia terdaftar. Besarnya output yang diperoleh dan sebuah sistem pendidikan, memang sulit diukur secara tepat. Cara paling sederhana barangkali adalah dengan menghitung jumlah (kuantitas) dan uji kualitas lulusan.[12] Berkaitan dengan evaluasi out-put penyelenggaraan pendidikan agama dalam rangka pencapaian stándar nasional pendidikan (SNP), maka indikator yang akan dievaluasi dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada standar kompetensi lulusan, yaitu dengan melihat hasil relajar dalam raport, baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan: (BAB V: Ps 25-27) (Permen Diknas No. 23 Tahun 2006) dengan melihat raport peserta didik (tentang hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor).

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Data yang terkumpul dideskripsikan menggunakan tabel atau grafik. Dalam pengumpulan data juga digunakan teknik kualitatif melalui *focus group discussion* (FGD) terhadap kepala sekolah, guru PAI dan pengawas serta kepala seksi Mapenda dan diknas kota.

---

[11] Muhaimin AG. 2000. Program Penyetaraan D-II GPAI SD/MI: Tinjauan sistemik, sebagaimana mengutip pendapat Combs, PH dan Hallak, J. *Managing Education Cost,* New York: OUP. (Jakarta: Dialog Desember), h 78.

Evaluasi ini dilaksanakan di DKI Jakarta, Serang, Jogjakarta, Pekanbaru, NAD, Balikpapan, Pontianak, Kendari, Gorontalo dan Sorong. Sumber data yang dipergunakan meliputi: (1) dokumen-dokumen tertulis yang ada pada seksi Mapenda, sekolah, dan Dinas Pendidikan, (2) pengelola (Kepala Seksi Mapenda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kasubag TU, Pengawas PAI, dan Guru PAI). Adapun populasi penelitian adalah penyelenggara pendidikan PAI SMP, yaitu Kepala SMP, Kepala TU SMP, Pengawas PAI SMP, dan seluruh guru PAI SMP. Sampel diambil secara purposif sampling, untuk GPAI berjumlah 128 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu: (1) daftar isian (2) angket, (3) pedoman wawancara. Daftar isian digunakan untuk menjaring data sekunder tentang penyelenggaraan PAI. Angket digunakan untuk menjaring data primer penyelenggaraan PAI. Pedoman wawancara digunakan untuk memperdalam analisis tentang penyelenggaraan PAI sesuai standar nasional pendidikan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif sedangkan data yang bersifat kualitatif dianalisis menggunakan teknik kategorisasi dan penafsiran data.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan agama di SMP dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan, maka dalam pembahasan ini secara sistemik diungkapkan tentang evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi out-put penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SMP dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.

Kategori untuk menafsirkan secara kualitatif, menurut Sudjana (2002) dapat digunakan analisis *skor nilai ideal*, yaitu perbandingan skor rata-rata dengan skor maksimal masing-masing variabel. Dengan pengkategorian nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi; (a) 90% - 100% = Sangat Baik, (b) 80% - 89% = Baik, (c) 65% - 79% = Cukup, (d) 55% - 64% = Kurang, dan (e) 0% - 54% = Sangat kurang baik. Dengan mengacu kepada kategori tersebut maka data tentang input, proses dan output dimaknai sebagai hasil penelitian evaluasi penyelenggaraan PAI pada SMP yang menerapkan KBK/KTSP sesuai standar nasional pendidikan ini.

A. Evaluasi Input

Sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup, bahwa komponen input meliputi sarana, prasarana, personil

dan biaya serta segala fasilitas yang ada dan dipakai dalam berbagai jenis dan bentuk. Tujuan diadakan evaluasi input adalah dalam rangka menyediakan informasi guna menentukan bagaimana menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan agama.

Berkaitan dengan evaluasi input penyelenggaraan PAI dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), maka indikator yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah: (1) standar isi PAI; (2) standar GPAI; dan (3) standar sarana dan prasarana.

1. Standar Isi PAI

Pembahasan tentang standar isi PAI tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, BAB III tentang standar Isi, diantaranya meliputi kerangka dasar kurikulum PAI (Pasal 5,6,7,8,9), dan beban belajar PAI (Pasal 10,11,12,13, 14,1516,17).

a. Kerangka Dasar Kurikulum PAI

Dalam penjelasan Bab III Permendiknas no 22 Tahun 2006 tentang standar isi tentang kerangka dasar kurikulum, termasuk kurikulum pendidikan agama Islam (pasal 5,6,7,8,9. Adapun dalam penyusunan kerangka dasar kurikulum pendidikan agama di sekolah secara keseluruhan aspek telah diterapkan dengan mencapai kategori *baik* sesuai standar nasional pendidikan, akan tetapi belum mencapai kategori sangat baik atau ideal. Beberapa aspek yang mencapai kategori sangat baik secara berurutan dari yang paling tinggi adalah aspek memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aspek memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aspek mempertimbangkan dinamika perkembangan Iptek, dan aspek diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan prosentasi 90%. Aspek yang mencapai kategori baik adalah dalam aspek memperhatikan karagaman karakteristik peserta didik dan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan kongkrit pengguna dengan masing-masing perolehan prosentase 85%. Adapun aspek-aspek yang hanya mencapai kategori *cukup baik*, yaitu pelibatan *stake holders* (misalnya komite sekolah), dilaksanakan dengan pendekatan multistrategi dan multi media, dan dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya dan kekayaan daerah untuk keber-hasilan PAI.

b. Beban Belajar PAI

Pembahasan tentang beban belajar pendidikan agama Islam termuat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 yang pencapaian aspek-aspek beban belajar PAI di sekolah secara keseluruhan telah mencapai kategori *sangat baik*, terutama pada aspek jam pembelajaran PAI dialokasikan sesuai struktur kurikulum PAI, aspek kegiatan tatap muka per jam berlangsung selama 40 menit, aspek kegiatan terstruktur diarahkan untuk mencapai standar kompetensi, jumlah jam pelajaran perminggu dilaksanakan sebanyak 2 jam pelajaran, dan minggu efektif pembelajaran PAI dalam setahun adalah 34-38 minggu. Ini berarti beban belajar pendidikan agama Islam di sekolah di daerah sasaran penelitian telah diterapkan sesuai/mencapai standar nasional pendidikan. Beberapa aspek yang telah dilakukan dengan mencapai kategori baik adalah waktu efektif pembelajaran persemester adalah 17-19 jam pelajaran dan kegiatan terstruktur diarahkan untuk mencapai stándar kompetensi.

2. Standar GPAI

Mengenai standar GPAI tercantum dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, BAB VI Standar Pendidikan dan Tenaga kependidikan, meliputi kualifikasi akademik (Pasal 28-34), kualifikasi agen pembelajaran (Paedagogik, professional, kepribadian dan sosial).

a. Kualifikasi Akademik

Tingkat pendidikan GPAI SMP, sesuai UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005 telah mensyaratkan berijasah S.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan tingkat pendidikan GPAI SMP sebagian besar (82,81%) telah memenuhi persyaratan berijasah S.1. Ini artinya dilihat dari kualifikasi akademik guru pendidikan agama tingkat SMP sebagian besar telah mencapai standar minimal, bahkan 1,56% telah berijasah melampaui standar minimal tingkat pendidikan guru SMP, yaitu telah berijasah S.2. Keadaan ini juga menunjukkan kualifikasi akademik GPAI SMP dapat dibanggakan. Namun demikian masih terdapat 14,84% tingkat GPAI SMP yang berpendidikan D3 dan 0,78% yang berpendidikan SLTA.

b. Kompetensi GPAI

Kompetensi GPAI dalam penelitian ini diklasifikasikan pada empat bidang, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompe-tensi sosial. Pengklasifikasian ini didasarkan atas Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat 1 dan penjelasannya, yaitu:

1) Kompetensi pedagogik GPAI

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Indikator kompetensi ini meliputi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktuali-sasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari indikator kompetensi pedagogik GPAI secara keseluruhan telah mencapai kategori *sangat baik*. Ini berarti penguasaan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di sekolah sasaran penelitian telah sesuai standar nasional pendidikan. Adapun aspek-aspek yang mencapai kategori sangat baik tersebut secara berurutan dari yang paling tinggi adalah: mempersiapkan rencana pembelajaran; memotivasi untuk mempelajari materi yang telah disampaikan; menggunakan metode pembelajaran sesuai materi ajar; menentukan jenis evaluasi tertentu sesuai dengan materi pelajaran; dan mendorong untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi kepribadian GPAI

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Dari indikator kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam secara keseluruhan telah mencapai kategori *sangat baik*. Ini berarti kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam di sekolah sasaran penelitian telah sesuai standar nasional pendidikan. Aspek-aspek yang mencapai kategori sangat baik ini secara berurutan dari yang paling tinggi adalah: mengucapkan salam pada awal pembelajaran; memulai pelajaran dengan melakukan doa bersama terlebih dahulu; mengakhiri pelajaran sesuai waktu yang dialokasikan; berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan; mengajarkan mata pelajaran agama dengan bersemangat; dan mengatasi persoalan peserta didik dengan adil.

3) Kompetensi profesional GPAI

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Indikator kompetensi ini adalah kemampuan guru PAI dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dari indikator kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam secara keseluruhan telah mencapai kategori *baik* diambang *sangat baik*. Ini berarti kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di sekolah sasaran penelitian telah mendekati ideal dalam mencapai standar nasional pendidikan. Aspek-aspek yang mencapai kategori sangat baik antara lain adalah mengajar sesuai dengan bidang keahlian, menyajikan materi pelajaran

secara sistematis, dan meyakinkan pemahaman melalui pertanyaan umpan balik. Adapun aspek-aspek yang mencapai kategori baik, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan perkembangan Iptek, mendiskusikan tentang kemajuan belajar peserta didik dan belajar otodidak untuk mengembangkan wawasan keilmuan PAI.

4) Kompetensi sosial GPAI

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dari indikator kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam secara keseluruhan telah mencapai kategori *sangat baik*, terutama untuk aspek membangun kerja sama yang baik dengan kepala sekolah, aspek menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, dan aspek membangun kerja sama yang baik dengan sesama guru. Ini berarti kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam di sekolah di daerah sasaran penelitian telah sesuai standar nasional pendidikan. Namun demikan dari indikator-indikatornya terdapat pula aspek yang mencapai kategori baik, yaitu keterlibatan guru agama dalam kegitan kemasyarakatan, dan dalam membangun kerja sama yang baik dengan orang tua wali peserta didik dalam menangani masalah peserta didik.

3. Standar Sarana dan Prasarana PAI

Untuk standar sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, BAB VII tentang standar sarana dan prasarana (Pasal 42- 48).

a. Standar Sarana

Dalam pemanfaatan sarana pendidikan agama secara keseluruhan aspek baru dalam kategori *cukup baik* untuk mencapai standar nasional pendidikan, dan belum mencapai kategori baik apalagi sangat baik atau ideal. Ada satu indikator atau yang mencapai kategori baik, yaitu pemanfaatan buku penunjang PAI dalam pembelajaran. Aspek yang mencapai kategori baik adalah pada pemanfaatan buku teks PAI dalam pembelajaran, penggunaan alat peraga sesuai kebutuhan pembelajaran PAI, dan pemanfaatan komputer untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI. Aspek yang mencapai kategori cukup baik, yaitu Alat peraga yang digunakan sesuai dengan materi PAI dan pemanfaatan alat peraga untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI. Adapun pemanfaatan sarana yang berkategori sangat kurang ialah pada pemanfaatan OHP dan

pemanfaatan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI.

b. Standar Prasarana

Dalam pemanfaatan prasarana pendidikan agama secara keseluruhan telah mencapai kategori *baik* sesuai standar nasional pendidikan, dan belum mencapai kategori sangat baik atau ideal. Aspek-aspek yang telah mencapai kategori sangat baik adalah dalam pemanfaatan ruang belajar untuk kegiatan pembelajaran, pemanfaatan tempat ibadah untuk praktek pembelajaran PAI, , dan pemanfaatan tempat ibadah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Aspek yang mencapai kategori baik, yaitu dalam pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan beribadah, dan pemanfaatan prasarana praktek untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI. Adapun aspek yang hanya mencapai kategori cukup baik adalah pada pemanfaatan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI, sedangkan aspek yang sangat kurang baik adalah pada pemanfaatan laboratorium untuk praktek pembelajaran PAI.

Jenis-jenis alat peraga yang berkaitan dengan pembelajaran PAI di SMP, bermacam-macam, antara lain Al-Quar'an, Juz Amma, gambar tata cara wudlu, gambar tata cara salat, kartu tajwid, tulisan huruf hijaiyah, tulisan bacaan Al-Qur'an, tulisan bacaan hadist, buku iqra jilid I – VI, komputer khusus guru agama, CD seni baca Al-Qur'an, kaset tentang agama, tulisan kaligrafi, dan lain sebagainya. Tentu keberadaan sarana pembelajaran di masing-masing SMP tidak terpenuhi secara lengkap, namun hanya dipunyai sebagian-sebagian saja.

Diantara kelengkapan tempat beribadah SMP, kebanyakan telah mempunyai tempat ibadah khusus, yaitu masjid, mushala atau ruang kelas yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah di sekolah. Masing-masing tempat ibadah di sekolah sebagian dilengkapi oleh kelengkapan diantaranya; tempat berwudu, karpet, tikar sajadah, telekung, buku Iqra I – VI, Al-Qur'an, Al-Qur'an dan tarjamahnya, almari khusus berisi buku agama, perlengkapan alat-alat salat (mukenah, sarung, peci), CD seni baca Al-Qur'an, tulisan surat-surat pendek dan kaset2 tentang agama. Keadaan kelengkapan tersebut ada yang memadai, cukup memadai dan ada yang kurang memadai.

B. Evaluasi Proses

1. Standar Proses PAI

Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Untuk melihat standar proses pendidikan

agama dilakukan melalui wawancara, daftar isian dan pengamatan terhadap proses penyelenggaraaan pendidikan agama di sekolah dengan mengacu rambu-rambu standar proses dalam standar nasional pendidikan (BAB IV Standar Proses: Ps 19-24). Adapun hasilnya secara kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada aspek *Perencanaan pembelajaran* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, maka berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa guru pendidikan agama menyatakan bahwa pada umumnya mereka sudah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kalender pendidikan. Kemudian dalam pengecekan bukti fisik terhadap RPP dan kalender pendidikan yang dibuat GPAI, maka sebagian besar mereka membuat RPP dan kalender pendidikan secara bersama-sama dalam forum MGMP, sehingga tampak seragam antara RPP dan kalender pendidikan milik GPAI sekolah satu dengan lainnya. Namun demikian, ada pula RPP dan kalender pendidikan yang dibuat oleh GPAI secara mandiri dengan bentuk kreatifitas dan inovasi pembelajaran yang khas, meski ini jumlahnya sangat sedikit.

Sebelum melaksanakan tugas pembelajaran, hampir semua GPAI SMP di daerah sasaran penelitian terlebih dahulu telah melakukan perencanaan program pembelajaran yakni dengan menyusun program pembelajaran untuk semester genap dan ganjil untuk menentukan target atau capaian yang akan dihasilkan pada setiap semester. Disamping itu juga telah disusun silabus pembelajaran untuk menentukan standar kompetensi siswa, capaian hasil belajar, menentukan indikator, metode pembelajaran yang akan dipakai, alat bantu, sumber belajar yang digunakan dan menyiapkan serta melakukan penilaian hasil belajar siswa berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku siswa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran PAI di kelas, para GPAI SMP mengacu pada rencana program dan silabus yang telah disusun, sehingga target pembelajaran dapat dicapai dalam waktu dan tingkat pencapaian yang merata untuk semua SMP. Di samping itu pada umumnya siswa muslim mengikuti pembelajaran PAI dan setiap kegiatan pembelajaran semua siswa siswinya sudah memiliki/ membawa buku PAI. Para guru agama Islam sasaran penelitian sebagian besar telah menjelaskan kepada siswa

tentang pentingnya Ilmu Agama karena pengetahuan bagi manusia dalam menjalani hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam memberikan materi pelajaran, GPAI telah berusaha mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kondisi psikologis siswa, sehingga materi yang disampaikan benar-benar dapat dikuasai siswa dengan baik tanpa menimbulkan beban atau pikiran-pikiran yang mengarah pada faktor psikologis, seperti siswa menjadi ketakutan karena merasa tidak mampu menerima materi pelajaran yang diajarkan. Disamping itu guru mencoba menyampaikan materi pelajaran tersebut dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan, dengan media atau alat peraga seperti gambar dsb. Metode pembelajaran yang digunakan umumnya metode ceramah, diskusi dan sosiodrama, dan praktek. Adapun alat bantu belajar yang sering digunakan adalah gambar-gambar seperti orang shalat dll, serta Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk buku pedomannya disamping buku2 paket Pendidikan Agama. Semua proses pembelajaran tersebut agar efektif tentunya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan materi ajar dan mencari suasana yang kondusif.

Para GPAI SMP sasaran penelitian rata-rata telah menerapkan sistem pembelajaran secara interaktif. Siswa dalam hal ini diberi kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan mengembangkan ide-ide siswa berkaitan dengan materi pelajaran PAI yang sedang diajarkan. Dalam pembelajaran GPAI SMP rata-rata telah membangun kreativitas siswa dan memotivasi agar siswa lebih kreatif dan tidak sekedar mendengarkan apa yang disampaikan guru, tetapi cenderung lebih kreatif untuk berani mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami.

GPAI disamping memiliki fungsi sebagai pengajar untuk menyampaikan/mentrasfer ilmu kepada anak didik, GPAI juga harus mampu menjadi contoh tauladan yang baik bagi para siswa. Karena hakekat pembelajaran agama adalah untuk membangun akhlakul karimah bagi para siswa. Oleh karenanya hal itu tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran dalam kelas, tatapi juga dicontohkan melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan pribadi yang berakhlakul karimah. Melalui contoh ini barangkali siswa akan lebih bisa melihat realitas dengan mudah dan bahkan mungkin timbul keinginan untuk mengikutinya.

Dalam rangka memotivasi siswa belajar, guru mengajak siswa ke tempat ibadah, seperti masjid, surau dan tempat-tempat bersejarah. Guru memberi motivasi siswa dalam

membaca dan menulis Al-Qur'an serta siswa diajarkan tilawatul Qur'an (MTQ), azan, belajar membuat kaligrafi dll. Untuk memupuk kemandirian siswa, GPAI terkadang memberikan ulangan harian, praktek ibadah, pekerjaan rumah atau memberikan tugas kelompok kepada para siswa untuk melatih bekerjasama sesama teman.

c. Penilaian

Penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam oleh GPAI di daerah sasaran penelitian dilakukan melalui metode penilaian yang cukup bervariatif antara lain menggunakan test lisan, tes tertulis, portofolio, tes praktek dengan menggunakan bermacam-macam teknik penilaian yang dapat menilai siswa menyangkut 3 aspek yaitu kognitif (kemampuan), afektif (sikap) dan psikomotorik. Untuk mengetahui kemampuan kognitif dilaksanakan dengan menggunakan tes tertulis, Afektif dinilai dari sikap dan perilaku siswa dan psichomotorik dilakukan dengan tes praktek. Disamping itu variasi teknik penilaian seperti melalui: pemberian tugas-tugas pekerjaan rumah yang berguna untuk mengukur kemampuan masing-masing siswa dalam menyerap materi pelajaran agama yang telah disampaikan melalui pembelajaran dalam kelas; melakukan tes praktek ibadah salat, membaca dan menghafal ayat-ayat pendek dalam al-Qur'an dsb; memberikan tugas belajar kelompok kepada siswa, yang masing-masing kelompok telah ditentukan jumlahnya untuk menyelesaikan beberapa soal yang telah dipelajari; melakukan penilaian melalui pengamatan sehari-hari terhadap prilaku siswa yang tujuannya untuk mengetahui apakah materi agama yang disampaikan selama ini telah terserap dengan baik oleh siswa dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI SMP kepala sekolah telah melakukan pengawasan melalui: (1) pemantauan kegiatan pembelajaran secara langsung, yaitu kontrol terhadap kedisiplinan guru dan murid dan penyimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran; (2) mengevaluasi praktek kinerja GPAI dalam melaksanakan pembelajaran, menyangkut kedisiplinan dalam melakukan tugas dan melihat kekurangan yang dilakukan GPAI; (3) melakukan bimbingan dan pembinaan secara teknis edukatif; (4) penyusunan laporan pelaksanaan pembelajaran PAI oleh GPAI pada akhir tahun; dan (5) menetapkan langkah tindak lanjut terhadap hasil analisis pelaporan, tujuannya untuk menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam meningkatkan proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Pengawasan yang dilakukan pengawas Pendais pada pembelajaran PAI SMP difokuskan pada pengawasan akademik /edukatif dan administratif. Dalam melakukan pengawasan pengawas menyiapkan Instrumen, format dan blangko yang digunakan untuk kelengkapan administrasi. Pengawasan dan pembinaan diarahkan untuk mengevaluasi kinerja GPAI dalam pembelajaran yaitu mempersiapkan Format S3 (kunjungan kelas), Format S12 A (sikap profesional) dan format penilaian. Hasil pengawasan digunakan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas GPAI dalam mengemban tugasnya menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.

Pengawas PAI telah menjalankan tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dengan melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam disekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pengawas terutama yang berkaitan dengan bidang kegiatan: menyusun program, melaksanakan penilaian pengolahan data sumber daya pendidikan, analisis hasil belajar siswa, bimbingan kepada guru agama, contoh pelaksanaan tugas guru agama, penyusunan laporan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan serta pelaksanaan salah satu atau lebih kegiatan pengembangan profesi dan aspek lain yang meliputi prakarsa, kepemimpinan, ketaatan serta tanggung jawab.

2. Standar Penilaian PAI

Standar penilaian pendidikan, termasuk di dalamnya penilaian pendidikan agama Islam sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, BAB X, pasal 63-72, meliputi; penilaian hasil belajar, penilaian hasil belajar kelompok dan aspek penilaian PAI (kognitif, afektif dan psikomotorik).

a. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar PAI bagi peserta didik secara keseluruhan aspek telah mencapai kategori *sangat baik*. Ini berarti penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam di sekolah di daerah sasaran penelitian telah diterapkan sesuai/mencapai standar nasional pendidikan. Beberapa aspek yang telah dilakukan sesuai urutan yang paling tinggi adalah melakukan pre tes pada awal pembelajaran, memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran, melakukan evaluasi sumatif pada akhir program pembelajaran, melakukan post tes pada awal pembelajaran, dan melakukan umpan balik terhadap hasil evaluasi. Adapun aspek yang mencapai kategori baik, yaitu melakukan evaluasi formatif pada pertengahan

program pembelajaran dan pemberian tugas untuk materi yang bersifat praktek dan havalan.

b. Penilaian Hasil Belajar Kelompok

Penilaian hasil belajar kelompok PAI secara keseluruhan aspek telah dilakukan dengan mencapai kategori *baik*, dan belum mencapai kategori sangat baik atau ideal. Terdapat pencapaian aspek-aspek dalam kategori sangat baik, baik dan cukup baik. Pencapaian aspek-aspek yang sangat baik terdapat pada aspek menilai pencapaian kemampuan peserta didik dengan memadukan penilaian pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, menilai pencapaian kemampuan peserta didik melaui ulangan, dan menilai pencapaian ketrampilan melaui ujian praktek. Pencapaian aspek dalam kategori baik, yaitu pada aspek penilaian hasil belajar peserta didik oleh pemerintah digabungkan dengan penilaian hasil belajar formatif, penilaian perkembangan afeksi peserta didik dengan mengamati perubahan perilakunya, penilaian perkembangan kepribadian peserta didik dengan mengamati perubahan perilakunya, dan penilaian perkembangan psikomotorik peserta didik melalui pengamatan terhadap perilakunya. Adapun aspek yang hanya mencapai kategori cukup baik adalah pada pengukuran kemampuan siswa dalam bermusyawarah melalui diskusi kelompok.

C. Evaluasi Out-Put

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, BAB V: Pasal 25-27, dan tercantum pula dalam Permen Diknas No. 23 Tahun 2006, adalah dengan melihat hasil belajar dalam raport, baik pada aspek kognitif/ pengetahuan, afektif dan psikomotor. Untuk nilai rata-rata formatif dan sumatif PAI Siswa berdasarkan kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Nilai Hasil Tes Berdasarkan Kelas.

Deskripsi Statistik	Nilai Aspek Pengetahuan		Nilai Aspek Afektif		Nilai Aspek Psikomotor		Nilai Rata-Rata Semua Aspek	
	Formatif	Sumatif	Formatif	Sumatif	Formatif	Sumatif	Formatif	Sumatif
Rerata nilai kelas VII	73,7	73,5	72,8	72,8	73,3	74,2	73,2	73,5
Rerata nilai kelas VIII	74,3	74,4	74	73,9	74,5	74,3	74,26	74,20
Rerata nilai kelas IX	75	75,6	74,2	75,1	75,4	75,5	74,9	75,4

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa skor rerata

aspek pengetahuan kelas VII memiliki skor rerata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aspek afektif dan psikomotor, kecuali pada nilai sumatif aspek psikomotor. Namun nilai skor rerata semua aspek adalah dalam kategori baik, yaitu 73,2 untuk nilai rerata formatif semua aspek, dan 73,5 untuk sumatifnya. Ini berarti nilai rerata semua aspek siswa kelas VII telah mencapai kategori baik.

Skor rerata aspek pengetahuan, afektif dan psikomotor kelas VIII memiliki skor rerata yang seimbang, yaitu dalam kategori baik, yaitu 74,26, untuk nilai rerata formatif semua aspek, dan 74,20 untuk sumatifnya. Ini berarti nilai rerata semua aspek siswa kelas VIII mencapai kategori baik.

Skor rerata aspek pengetahuan, afektif dan psiko-motor kelas IX memiliki skor rerata yang seimbang, yaitu dalam kategori baik, yaitu 74,9 untuk nilai rerata formatif semua aspek, dan 75,4 untuk sumatifnya. Ini berarti nilai rerata semua aspek siswa kelas IX telah mencapai kategori baik.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penyelenggaraan PAI tingkat SMP dalam rangka pencapaian SNP

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP dalam pemenuhan Standar Pendidikan Nasional (SNP). Beberapa faktor tersebut ada sebagian yang berperan sebagai faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran, namun ada juga yang justru berperan sebagai kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan pembelajaran.

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung kelancaran pelaksanaan PAI ini antara lain tersedianya GPAI yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Rata-rata GPAI berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi agama seperti IAIN, STAIN/S, dan PTAIS berasal dari fakultas Tarbiyah. Meskipun ada yang berasal dari fakultas lain seperti Syariah, Ushuludin, Dakwah, namun jumlah mereka sangat sedikit dan umumnya mereka merupakan guru non PNS. Meskipun bukan berasal dari Fakultas tarbiyah, namun karena materi pendidikan agama SMP tidak terlalu tinggi, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki dapat dikatakan memadai. Sedangkan secara kuantitas, jumlah mereka cukup memadai untuk mengajar di SMP. Karena materi pelajaran agama SMP memiliki jam pelajaran yang sedikit yakni sekitar 3 jam seminggu ditambah praktek

di luar jam pelajaran, maka jumlah guru yang tersedia mampu mengampu seluruh kelas yang ada.

Faktor sarana prasarana pembelajaran yang memadai seperti buku-buku pelajaran yang memadai ditambah buku-buku penunjang yang ada di perpustakaan dan ketersediaan al-Qur'an, alat bantu belajar yang memadai seperti gambar, VCD, OHP, sarana pembelajaran lain sepeti musala dengan perlengkapan mukenah, boneka dan kain kafannya dsb. Semua sarana prasarana tersebut sangat membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran PAI, karena sarana prasarana tidak menjadi masalah sebab rata-rata SMP pernah mendapat bantuan paket musala, laboratorium untuk kegiatan agama, buku-buku agama, dsb.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama antara guru agama Islam dan guru mata pelajaran khususnya yang beragama Islam yang cukup harmonis juga menjadi faktor pendukung kelancaran pembelajaran PAI. Kerjasama ini terkait dengan kegiatan para guru dalam mempersiapkan pembelajaran misalnya dalam meyusun RP dan silabus. Mereka saling membantu secara teknis dalam penyusunannya. Kerjasama dalam pelaksanaan ibadah khususnya pada waktu salat jamaah, dalam membimbing siswa dsb.

Dari beberapa faktor pendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran PAI ini, sesungguhnya yang paling mendukung adalah adanya semangat para GPAI dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun sering terjadi diskriminasi terhadap para GPAI khususnya yang ber-NIP 15, namun GPAI ini tetap memiliki semangat mengajar yang luar biasa. Inilah sesungguhnya yang menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan pembelajaran PAI.

2. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan PAI juga cukup banyak, namun faktor paling utama berangkat dari adanya dualisme pembinaan terhadap GPAI. Adanya dualisme pembinaan ini merugikan terhadap masing-masing GPAI baik yang ber-NIP 15 maupun 13, karena masing-masing instansi (Depag dan Diknas) terkadang kurang obyektif dan lebih mementingkan GPAI yang menjadi asuhannya, akibatnya sering terjadi kesenjangan dalam mengakomodir mereka. Seperti pemberian tunjangan kesra, insentif, THR, dsb. oleh Pemda yang hanya diberikan pada GPAI yang ber-NIP 13 dan belum menjamah GPAI ber-NIP 15. Demikian juga terkait dengan kegiatan pembinaan GPAI baik oleh Diknas maupun Depag yang lebih banyak melibatkan GPAI asuhannya.

Persoalan-persoalan semacam itu sering menjadi penyebab terjadinya kesenjangan dan menimbulkan kecemburuan oleh masing-masing GPAI yang dirugikan. Adanya perasaan kurang diperhatikan oleh instansi tersebut, terkadang menimbulkan kecemburuan dan mengurangi semangat GPAI dalam melaksanakan tugas mengajar. Namun demikian, banyak juga GPAI yang tetap semangat melaksanakan tugas dan berusaha mengesampingkan perasaan-perasaan tersebut.

Terkait dengan jenjang karir, juga dirasakan masih terdapat kendala. Bagi GPAI ber-NIP 15 yang mengajar di SMP, tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah SMP meskipun dia telah memenuhi persyaratan dan pantas diangkat menjadi kepala sekolah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, dengan alasan karena GPAI yang bersangkutan bukan merupakan pegawai yang diangkat oleh Diknas, sementara wewenang pengangkatan kepala sekolah SMP tersebut ada apada Diknas. Sementara bagi GPAI ber-NIP 13 yang mengajar di SMP tidak dapat diangkat menjadi pengawas, karena pengangkatan pengawas PAI merupakan wewenang Depag, sementara GPAI yang bersangkutan merupakan pegawai yang diangkat oleh Diknas. Persoalan semacam ini, terkadang mengendurkan semangat GPAI dalam meniti karir keguruannya. Menghadapi persoalan tersebut, Depag harus lebih responsif mengakomodir para GPAI ber-NIP 15 untuk menjadi pengawas PAI, karena untuk meniti karir menjadi kepala sekolah merupakan kemustahilan bagi mereka.

Perubahan kurikulum yang sering terjadi, terkadang membingungkan bagi para GPAI terutama yang memiliki kemampuan di bawah standar. Adanya perubahan kurikulum ini sering menjadikan pelaksanaan pembelajaran malah kurang maksimal, karena guru mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan yang terlalu cepat dan sering terjadi.

Rekruitmen guru agama yang tidak jelas wewenangnya. Ketika rekrutmen guru agama dilakukan oleh Diknas, maka dalam rekruitmen tersebut kurang mengakomodir alumni perguruan tinggi agama seperti alumni IAIN, STAIN/S dan perguruan tinggi agama lainnya yang seharusnya memiliki hak lebih besar untuk diangkat menjadi PNS sebagai GPAI, karena merekalah secara kualifikasi dan kompetensi memenuhi syarat untuk diangkat menjadi GPAI. Alasan Diknas terkait dengan permasalahan ini adalah karena pengangkatan alumni perguruan tinggi agama sebagai PNS menjadi wewenang Depag. Sebalik-

nya, rekrutmen guru agama yang dilakukan oleh Depag, dalam penempatannya lebih mendahulukan madrasah daripada sekolah umum di bawah Diknas, padahal kebutuhan guru agama untuk madrasah dan sekolah umum di bawah Diknas sama besarnya. Dalam hal ini, Depag beralasan bahwa madrasah lebih membutuhkan dan hanya Depaglah yang selama ini konsen memenuhi kebutuhan guru agama di madrasah. Akibatnya sekolah umum di bawah Diknas kurang mendapat alokasi penempatan GPAI yang memadai, padahal jumlah sekolah umum di bawah Diknas dan jumlah siswa yang sekolah didalamnya jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan madrasah. Pengalokasian GPAI yang demikian dirasakan oleh para GPAI SMP kurang adil dan tepat sasaran. Persoalan semacam ini, jika tidak dicarikan jalan keluarnya akan terus menjadi permasalahan yang tentu saja mengganggu jalannya pelaksanaan belajar mengajar PAI di SMP dan juga di madrasah.

Dikeluarkannya PP No. 100 Tahun 2002 tentang pelarangan Diknas untuk mengangkat GPAI, di satu sisi melegakan bagi alumni perguruan tinggi agama, karena deskriminasi terhadap mereka dalam rekrutmen PNS oleh Diknas sudah tidak ada dan ini menumbuhkan semangat dan harapan bagi mereka terutama yang saat ini masih menjadi honorer di berbagai sekolah untuk bisa diangkat menjadi PNS sebagai GPAI. Namun di sisi lain, lahirnya SK tersebut menimbulkan kecemasan bagi sekolah-sekolah umum di bawah Diknas akan mendapat alokasi penempatan GPAI yang kurang proporsional. Dikhawatirkan Depag akan lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah di bawah Diknas. Mereka menyarankan kepada Depag selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pengangkatan GPAI, sebaiknya lebih diperbesar jumlahnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan GPAI seluruh sekolah baik sekolah dibawah Diknas maupun Depag.

3. Upaya-upaya Peningkatan Pembelajaran PAI

Berbagai upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pembelajaran PAI talah dilakukan baik oleh pihak sekolah sendiri, pengawas maupun oleh instansi terkait.

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah selaku pemimpin bertanggungjawab terhadap keberhasilan sekolah, telah memberikan perhatian serius dalam menangani pembelajaran PAI. Menurutnya PAI

merupakan salah satu materi pelajaran penting dalam membentuk watak dan pribadi siswa untuk menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur.

Salah satu yang menjadi perhatian kepala sekolah adalah melakukan peningkatan kompetensi GPAI. Di antaranya dengan mengefektifkan MGMP melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, mengirimkan GPAI dalam berbagai diklat, seminar maupun orientasi yang diselenggarakan oleh berbagai instansi baik Diknas, Depag maupun pemerintah daerah, memberikan supervisi atau bimbingan dan motivasi kepada para GPAI dalam melaksanakan tugas pembelajaran melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan *in home training* terhadap guru di sekolah.

Upaya-upaya peningkatan pembelajaran PAI yang juga dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan melakukan pembinaan di bidang administrasi, meliputi penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran, memfasilitasi kenaikan pangkat guru melalui PAK dan membantu kelancaran kenaikan pangkat guru. Melakukan supervisi dan monitoring untuk melihat bagaimana hasil pelaksanaan PAI selama ini dan untuk melihat kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PAI. Disamping itu juga dilakukan evaluasi hasil pembelajaran melalui laporan-laporan baik secara tertulis maupun lesan oleh para guru melalui pertemuan, maupun dengan melihat hasil pembelajaran melalui nilai hasil mid semester dan nilai akhir semester dengan melihat buku raport siswa.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran PAI menurut kepala sekolah adalah penciptaan situasi pembelajaran PAI yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu kedepan perlu lebih ditingkatkan kreativitas GPAI dalam melakukan tugas pembelajaran PAI. Pengembangan sarana prasarana pembelajaran yang lebih lengkap dan peningkatan profesionalisme guru dalam pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme GPAI, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh kepala sekolah antara lain melalui MGMP; mengikutsertakan GPAI dalam berbagai diklat, penataran, workshop, orientasi dsb baik yang diadakan oleh Depag, Diknas maupun Pemda setempat dan terus memberikan bimbingan dan motivasi kepada GPAI untuk lebih giat lagi melakukan tugasnya dan melakukan berbagai pendalaman terkait dengan materi PAI yang akan diajarkan.

Terkait dengan PP NO 19 tahun 2005 tentang SNP khususnya mengenai pendidikan agama Islam, secara umum kepala sekolah setuju dan menyambut baik hal tersebut, akan tetapi harus lebih mengutamakan proses daripada konsep, karena dalam pelaksanaannya terkadang secara konseptual siswa mampu memahami dan mengerti, namun dalam prakteknya kurang aplikatif dan kurang menjaga akhlaknya. Oleh karena itu perlu kiranya disusun satu pedoman terkait dengan strategi pembelajaran yang lebih baik agar guru mampu melaksanakan pembelajaran PAI sesuai dengan SNP tersebut.

b. Pengawas

Pengawas selaku pihak yang berwenang melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, memiliki tugas dalam pengembangan pembe-lajaran agar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Upaya-upaya yang telah dilakukan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran PAI selama ini antara lain pembinaan secara terus menerus terhadap para GPAI baik melalui pertemuan maupun melalui kunjungan ke sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas tersebut antara lain melalui kunjungan kelas maupun supervisi klinis yang disampaikan melalui laporan atau pertemuan.

Hal-hal yang dipersiapkan pengawas ketika akan melakukan pengawasan atau kunjungan adalah dengan terlebih dahulu mempelajari materi PAI secara komprehyensif yang menjadi bahan ajar guru; mempelajarai kurikulum PAI secara menyeluruh; mempersiapkan perangkat pembinaan termasuk sumber-sumber lain di luar materi pegangan para guru. Persiapan ini dilakukan untuk lebih memahami dan menguasai materi pengawasan yang akan dilakukan, sehingga dalam melakukan pembinaan dan bimbingan lebih banyak memberi manfaat dan peningkatan kepada para GPAI. Adapun ketika akan melakukan evaluasi, hal-hal yang dipersiapkan pengawas antara lain berupa lembar evaluasi untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi terkait dengan pembelajaran PAI. Dalam melakukan evaluasi ini, pengawas senantiasa melakukan identifikasi permasalahan yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga mampu dicari jalan keluarnya dan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Dalam menanggapi peraturan pemerintah tentang SNP ini secara umum para pengawas menyambut baik, namun dalam pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai pihak terkait

terutama dari kalangan akademisi seperti Depag, IAIN dan MUI. Karena ada beberapa materi yang terkadang perlu didiskusikan oleh pihak-pihak yang lebih kompeten sebelum materi disampaikan kepada siswa.

Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan pembelajaran PAI ini antara lain alokasi waktu yang lebih banyak sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih baik. Disamping itu perlu juga didukung oleh sarana prasarana dan pendanaan yang memadai, sehingga pelaksanaan pembelajaran PAI dapat berjalan lancar sesuai harapan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah situasi pembelajaran yang kondusif, yakni adanya hubungan sinergik antara guru dengan siswa yang akrab akan membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran yang baik.

c. Instansi Terkait

Pihak lain yang turut berperan dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran PAI adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Keterlibatan pemerintah ini tidak sekedar sebagai pihak penentu kebijakan, sehingga dengan wewenangnya dapat menetapkan berbagai keputusan. Akan tetapi sebagai pihak berwenang, pemerintah harus pula mampu membaca aspirasi dari masyarakat terutama para GPAI selaku petugas lapangan yang secara langsung melaksanakan tugas pembelajaran. Sebagai pihak yang seharusnya mendapat perhatian dari intansi pemerintahan, namun terkadang GPAI diperlakukan tidak proporsional oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah telah mengkotak-kotakkan GPAI dalam kebijakannya, sehingga GPAI yang tidak berada dibawah wewenangnya menjadi terabaikan. Padahal dengan melihat pada beban tugas yang tidak berbada dengan GPAI lainnya, seharus mendapat perlakuan yang tidak berbeda pula.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran PAI di sekolah antara lain dukungan sarana prasarana pembelajaran dan sarana prasarana MTQ bagi pelajar serta dukungan pendanaan khususnya insentif guru terutama yang bernip 130, sedangkan GPAI bernip 150 sampai saat ini belum tersentuh. Upaya lainnya adalah membantu pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait dengan adanya perubahan kurikulum yakni dengan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Input Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP

a. Pada bagian standar isi PAI, hampir setiap komponennya telah mencapai katagori baik, sedangkan aspek yang kurang pada: penyusunan kerangka dasar kurikulum kurang melibatkan *stake holders* (misalnya komite sekolah); dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multi media; dan dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan PAI.

b. Pada bagian standar GPAI, hampir setiap komponennya telah mencapai katagori baik dalam pencapaian SNP, termasuk penguasaan kompetensi GPAI SMP sedangkan aspek yang kurang diperhatikan adalah sebagian GPAI masih berijasahkan D3.

c. Pada bagian standar sarana dan prasarana PAI, hampir setiap komponennya telah mencapai katagori baik, sedangkan aspek yang kurang pada; kesesuaan alat peraga yang digunakan dengan materi PAI, pemanfaatan alat peraga untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI, pemanfaatan OHP untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI dan pemanfaatan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran PAI. Pemanfaatan prasarana yang berkategori sangat kurang baik pada pemanfaatan laboratorium untuk praktek pembelajaran PAI.

2. Proses Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP

a. Pada bagian standar proses PAI, guru telah berusaha melakukan perencanan, pembelajaran dan penilaian dengan baik. Pengawasanpun telah dilakukan oleh pihak kepala sekolah dan pengawas PAI dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.

b Bagian standar penilaian PAI telah mencapai katagori baik dalam pencapaian standar nasional pendidikan, sedangkan aspek yang kurang diperhatikan adalah pada pengukuran kemampuan siswa dalam bermusyawarah melalui diskusi kelompok.

3. Output Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP.

Hasil belajar peserta didik untuk SMP kelas VII, VIII dan IX pada tahun akademik 2006/2007 sudah dapat dikatakan telah

mencapai prestasi baik, hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata formatif dan sumatif. Namun demikian peningkatan prestasi belajarnya antara nilai rata-rata formatif dan sumatif, relatif sedikit atau hampir tidak ada.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang mendesak untuk ditindaklanjuti adalah:

1. Input Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP
   a. Perlu penyusunan dan pengembangan kerangka dasar kurikulum dengan melibatkan *stake holders* (misalnya komite sekolah), dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multi media dan dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan PAI;
   b. Perlu meningkatkan tingkat jenjang pendidikan GPAI SMP yang masih berijasahkan D3, dengan pemberian beasiswa dan kesempatan melanjutkan ke jenjang S.1;
   c. Perlu pemanfaatan alat peraga yang sesuai dengan materi PAI, pemanfaatan alat peraga, OHP, sumber belajar, dan pemanfaatan laboratorium untuk praktek pembelajaran PAI.
2. Proses Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP
   a. Perlu peningkatan kinerja GPAI dalam melakukan perencanan, pelaksanan dan penilaian dengan baik dalam pembelajaran PAI. Pihak kepala sekolah dan pengawas PAI perlu peningkatan pengawasan dan pembinaannya terhadap GPAI.
   b. Dalam penilaian belajar kelompok, guru perlu meningkatkan kreatifitas dan inovasi siswa dalam bermusyawarah.
3. Output Penyelenggaraan PAI dalam Rangka Pencapaian SNP. Perlu peningkatan prestasi belajar peserta didik secara terus menerus agar prestasi yang baik dapat tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan.***

SUMBER BACAAN

Al Bone, Abd. Azis 2004): *Religiusitas Remaja Sekolah ditinjau dari Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga dan Pendidikan Agama Islam*, (Pidato Pengukuhan APU.

Arikunto, Suharsimi (2000): *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Departemen Agama (1999): *Kurikulum Sekolah Menengah "Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam"* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, Departemen Agama.

Moleong, Lexy.J (1990): *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja RoSMPakarya.

Namsa, Yunus (2000): *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus.

PP Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.: Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 2000.

Stufflebeam, Daniel (1977): *Educational Evaluation Decision Making* (Itasca. Illinois: F.E. Peacock Publisher, Inc.

UU Sisdiknas. Nomor 20 Tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta 2003.

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta 2005.

Wagiran, B.K, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Evaluasi Program* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 1995).

Yusuf dkk (1990): *Pendidikan Agama Islam, Suatu Analisis Rangsangan Afeksi* (Jakarta: Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum FPIPS-IKIP Jakarta.